BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

2023

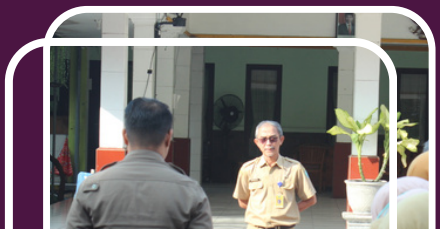

JL. H.R. MOCH. MANGOENDIPROJO NO. 270
Telepon. 0318921642
Email : buduran@sidoarjokab.go.id Website : sidoarjokab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, 12 Pebruari 2024

TIM SAKIP KAB. SIDOARJO,
SEKRETARIS

Ditandatangani secara elektronik oleh

ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.
NIP. 197804161997021001

ARIF MULYONO, S.STP, M.HP.
Pembina Tingkat I
NIP 19780416 199702 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh *stakeholders*, Tanggapan (*feedback*) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Selain itu, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, 15 Februari 2024
CAMAT BUDURAN

Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. SYAMSURIJAL
NIP. 196609121992031013

Drs. SYAMSURIJAL
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196609121992031013

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GRAFIK vi

DAFTAR GAMBAR vi

IKHTISAR EKSEKUTIF vii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

Kedudukan 1

Aspek Strategis Organisasi 3

BAB II 5

PERENCANAAN KINERJA 5

Rencana Srategis Tahun 2021-2026 5

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 6

Perencanaan Anggaran Tahun 2023 6

BAB III 9

AKUNTABILITAS KINERJA 9

Pengukuran Kinerja 9

Realisasi Kinerja Anggaran 22

BAB IV 26

PENUTUP 26

Kesimpulan 26

Tindak Lanjut 26

LAMPIRAN – LAMPIRAN 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data ASN Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo 2
Tabel 1. 2 Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah.....3

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.....5
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....6
Tabel 2. 3 Rincian anggaran pada tahun 2023 6

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.....9
Tabel 3. 2 Realisasi kinerja sasaran pertama meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Buduran Tahun 2023.....10
Tabel 3. 3 Tren Realisasi dari Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021 – 2023 11
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pertama Tahun 2023 Kecamatan Buduran dengan Kecamatan Gedangan 13
Tabel 3. 5 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Pertama Sasaran Kedua “Nilai SAKIP Kecamatan Buduran” 14
Tabel 3. 6 Tren Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2021 – 2023.....15
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kedua Tahun 2023 Kecamatan Buduran dengan Kecamatan Gedangan 16
Tabel 3. 8 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kedua Sasaran Kedua “Nilai RB” 17
Tabel 3. 9 Tren Realisasi Nilai RB Tahun 2021 – 2023.....18
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kedua Tahun 2023 Kecamatan Buduran dengan Kecamatan Gedangan.....19
Tabel 3. 11 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Ketiga Sasaran Kedua “Nilai IPP”.....20
Tabel 3. 12 Tren Realisasi dari Nilai IPP Tahun 2021 – 2023 21
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kedua Tahun 2023 Kecamatan Buduran dengan Kecamatan Gedangan.....22
Tabel 3. 14 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....23
Tabel 3. 15 Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....24
Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran 25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.2. 1 Realisasi kinerja sasaran Pertama meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Buduran Tahun 2023 10
Grafik 3.2. 2 Tren Realisasi dari Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021 – 2023 12
Grafik 3.2. 3 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Pertama Sasaran Kedua “Nilai SAKIP Kecamatan Buduran” 15
Grafik 3.2. 4 Tren Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2021 – 2023 15
Grafik 3.2. 5 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kedua Sasaran Kedua “Nilai RB” 18
Grafik 3.2. 6 Tren Realisasi dari Nilai RB Tahun 2021 – 2023 19
Grafik 3.2. 7 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Ketiga Sasaran Kedua “Nilai IPP” 20
Grafik 3.2. 8 Tren Realisasi dari Nilai IPP Tahun 2021 – 2023 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Buduran 2

Gambar 2. 1 Rekapitulasi Aduan Masyarakat melalui LAPOR.GO.ID 11

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Kecamatan Buduran Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Tahun 2023. Kami memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap kedua indikator, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator ;
2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 0 indikator ;
3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator ;
4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator.

Target Nilai RB tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya dikarenakan tidak adanya penilaian Reformasi Birokrasi di tahun 2023 sesuai dengan PERMENPAN No 9 Tahun 2023, sehingga penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ditiadakan.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	70%	100%	142,86%
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	a. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	a. A (80,05)	a. BB (79,76)	a. 99,64%
		b. Nilai RB Kecamatan Buduran	b. 31,25	b. 0	b. 0
		c. Nilai IPP Kecamatan Buduran	c. B (3,55)	c. B- (3,45)	c. 97,18%

KETERANGAN :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

BAB I
PENDAHULUAN

1 Kedudukan

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka **Kecamatan Buduran** Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Kewilayahan.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja **Kecamatan Buduran** Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan **Kecamatan Buduran** Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ;
2. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
3. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
4. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
5. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum ;
6. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan ;
7. Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
8. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa dan Kelurahan ;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan ;
10. Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan ;
11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. **Kecamatan Buduran** Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Camat. Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi **Kecamatan Buduran** Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

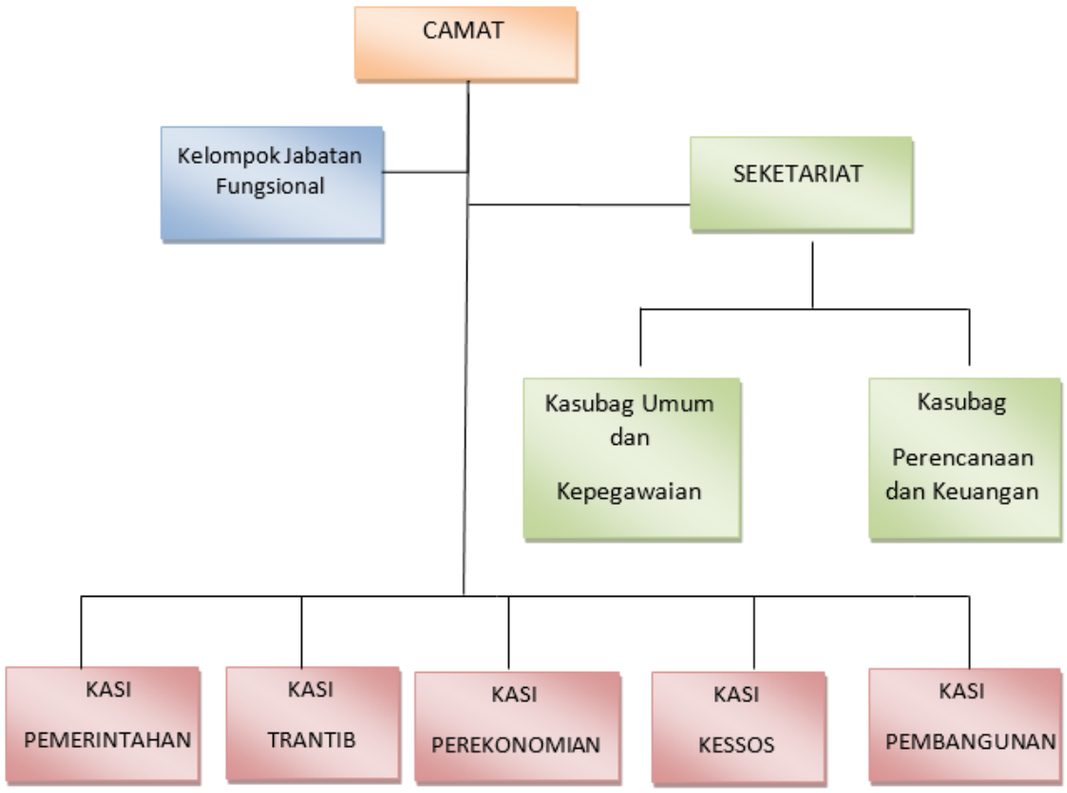

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Kecamatan Buduran
Sumber data : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 tahun 2016

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 21 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada **Kecamatan Buduran** Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2022 :

Tabel 1. 1
Data ASN Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Administrator	1
3	Pengawas	5
4	Pelaksana	13
5	Jabatan Fungsional Ahli	0
6	Jabatan Fungsional Terampil	1

Sumber data : Data Primer Tahun 2023

2` *Aspek Strategis Organisasi*

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada **Kecamatan Buduran** Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. 2
Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan dan Ketersediaan SDM Aparatur yang ada belum memadai	a. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan b. Masih terbatasnya jumlah petugas pelayanan di ruang pelayanan PATEN c. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi SDM Aparatur Kecamatan sehingga kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2	Masih kurang optimalnya sosialisasi tentang Penerapan Teknologi Informasi serta SOP dan SP pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Penerapan Teknologi Informasi serta SOP dan SP pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait penerapan teknologi informasi dan prosedur pelayanan administrasi (SOP dan SP) yang telah dipublikasikan
3	Belum tertib dan tepat waktunya administrasi pemerintahan desa dalam perencanaan, pelaporan dan penganggaran (penyusunan APBDes)	Ketersediaan SDM Aparatur Desa yang ada masih belum memadai dalam segi kuantitas dan kualitas	a. SDM Aparatur Desa masih kurang memahami perencanaan, pelaporan dan penganggaran b. Masih rendahnya akurasi data sebagai database perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kecamatan
4	Rendahnya intensitas koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan	Masih kurang dukungan dan koordinasi dari Dinas/ Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan	a. Masih kurangnya peran serta dan partisipasi dari semua pihak terkait (Masyarakat, Desa, Kecamatan dan Dinas/Instansi terkait) dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan (misal : Musrenbang)

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
			b. Juknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat belum tersedia

Sumber data : Renstra Tahun 2021 – 2026

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas **Kecamatan Buduran** Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan ;
2. Masih terbatasnya jumlah petugas pelayanan di ruang pelayanan PATEN ;
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi SDM Aparatur kecamatan sehingga kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya ;
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait penerapan teknologi informasi dan prosedur pelayanan administrasi (SOP dan SP) yang telah dipublikasikan ;
5. SDM Aparatur Desa masih kurang memahami perencanaan, pelaporan dan penganggaran ;
6. Masih rendahnya akurasi data sebagai database perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Kecamatan ;
7. Masih kurangnya peran serta dan partisipasi dari semua pihak terkait (Masyarakat, Desa, Kecamatan dan Dinas/Instansi terkait) dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan (misal : Musrenbang) ;
8. Juknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat belum tersedia.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A Rencana Srategis Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi **"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"**. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari **Kecamatan Buduran** Kabupaten Sidoarjo adalah menunjang misi 1 **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha**" dan misi 5 **"Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga".**

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra **Kecamatan Buduran** Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan, akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum		Niai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	82,8	88	88	89	89	90
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	70%	70%	70%	100%	100%	100 %
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Niai SAKIP Kecamatan	78,47	80	80,05	80,1	80,15	80,2
			2. Niai RB	30,37	31,12	31,25	31,35	31,45	32
			3. Niai IPP	3,19	3,51	3,55	3,57	3,60	3,80

Sumber data : Reviu Renstra Tahun 2021 - 2026

B Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran **Kecamatan Buduran.** Berikut Perjanjian kinerja tahun 2023 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang Diselesaikan	70%
No	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Tambahan**	**Target**
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	A (80,05)
		Nilai RB	31,25
		Nilai IPP	B (3,55)

Sumber data : Perjanjian Kinerja Tahun 2023

D Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 5.468.011.127,- Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 5.618.723.545,- dengan rincian sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2. 3
Rincian Anggaran Kecamatan Buduran Tahun 2023

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.005.500	Rp. 2.005.500
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.304.329.527	Rp. 3.399.034.236
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 368.145.237	Rp. 353.859.237

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 0	Rp. 49.506.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.574.927.823	Rp. 1.546.118.975
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 105.000.000	Rp. 88.500.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 2.512.500	Rp. 1.112.500
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 50.000.000	Rp. 42.100.000
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 8.250.000	Rp. 63.021.557
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 21.297.540	Rp. 21.297.540
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 5.312.500	Rp. 5.312.500

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 24.040.500	Rp. 44.965.500
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 1.890.000	Rp. 1.890.000
Total Anggaran				**Rp. 5.468.011.127**	**Rp. 5.618.723.545**

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja *(performance plan)* yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja *(performance result)* yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terhadap terjadinya celah kinerja *(performance gap)*, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja Sekretariat/Dinas/Badan/Kecamatan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi. Adapun capaian kinerja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Capaian Kinerja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	70%	100%	142,86%	100%	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	a. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	a. A (80,05)	a. BB (79,76)	a. 99,64%	a. A (80,2)	a. 99, 45%
		b. Nilai RB Kecamatan Buduran	b. 31,25	b. 0	b. 0	b. 32	b. 0
		c. Nilai IPP Kecamatan Buduran	c. B (3,55)	c. B- (3,45)	c. 97,18%	c. B (3,8)	c. 90,8%

Sumber data : Reviu Renstra Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023. Berikut analisis capaian kinerja pada **Kecamatan Buduran** Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagai berikut :

1. **Sasaran Pertama "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum".**

   Untuk Sasaran Pertama pada Tahun 2023 nilai capaian kinerjanya sebesar 142,86%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja Sasaran Pertama yaitu "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum"

Tabel 3. 2
Realisasi Indikator Kinerja (IK) Sasaran Pertama "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum" Kecamatan Buduran Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	70%	100%	142,86%	100%	100%

Sumber data : Reviu Renstra Tahun 2021 - 2025

Grafik 3.2. 1
Realisasi Indikator Kinerja (IK) Sasaran Pertama "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum" Kecamatan Buduran Tahun 2023

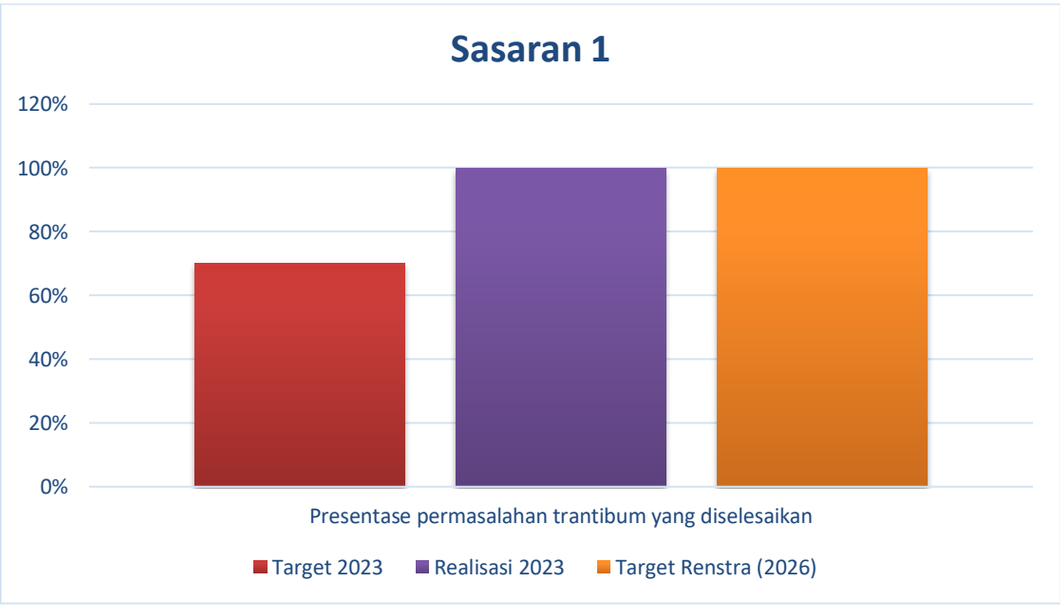

Sumber data : Reviu Renstra Tahun 2021-2026

Dalam pencapaian Sasaran Pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) Indikator. Indikator tersebut yaitu Presentase Permasalahan Trantibum yang Diselesaikan. Perhitungan keberhasilan indikator ini berasal dari jumlah permasalahan trantibum yang diselesaikan dibagi dengan jumlah seluruh permasalahan trantibum yang masuk kemudian dikalikan 100%.

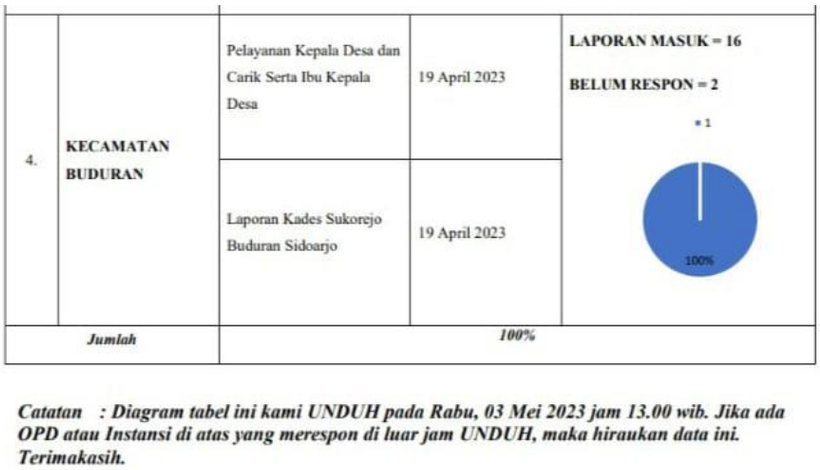

4.	KECAMATAN BUDURAN	Pelayanan Kepala Desa dan Carik Serta Ibu Kepala Desa	19 April 2023	LAPORAN MASUK = 16 BELUM RESPON = 2
		Laporan Kades Sukorejo Buduran Sidoarjo	19 April 2023	
Jumlah		*100%*		

Catatan : Diagram tabel ini kami UNDUH pada Rabu, 03 Mei 2023 jam 13.00 wib. Jika ada OPD atau Instansi di atas yang merespon di luar jam UNDUH, maka hiraukan data ini. Terimakasih.

Gambar 2. 1 Rekapitulasi Aduan Masyarakat melalui LAPOR.GO.ID

Sumber data : Laporan Bulanan LAPOR.GO.ID olah Diskominfo

Berdasarkan Laporan Bulanan tersebut di atas yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Rekapitulasi Aduan Masyarakat melalui www.lapor.go.id Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) selama Tahun 2023 ada 16 laporan pengaduan yang masuk, Dari 16 laporan pengaduan yang masuk ada 14 laporan pengaduan yang dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Sisanya ada 2 laporan pengaduan yang tidak bisa segera atau serta merta ditindaklanjuti karena membutuhkan koordinasi lebih dulu dengan Dinas Teknis/Instansi/OPD terkait/Lembaga Vertikal/Pihak terkait, Namun pada akhirnya seluruh aduan masyarakat yang masuk telah 100% diselesaikan.

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2023 mencapai persentase sebesar 142,86%, dengan realisasi 100% dari target 70%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 100%, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tetap konsisten 100%. Hal ini dikarenakan adanya penyelesaian yang baik terhadap Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Buduran, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 3. 3

Tren Realisasi dari Indikator Kinerja (IK) Sasaran Pertama Tahun 2021 – 2023

Tahun	**2021**	**2022**	**2023**
Target	NA	70%	70%
Realisasi	NA	100%	100%
Capaian	NA	142,86%	142,86%

Sumber data : Data Primer Tahun 2022 dan 2023

Grafik 3.2. 2
Tren Realisasi dari Indikator Kinerja (IK) Sasaran Pertama Tahun 2021 – 2023

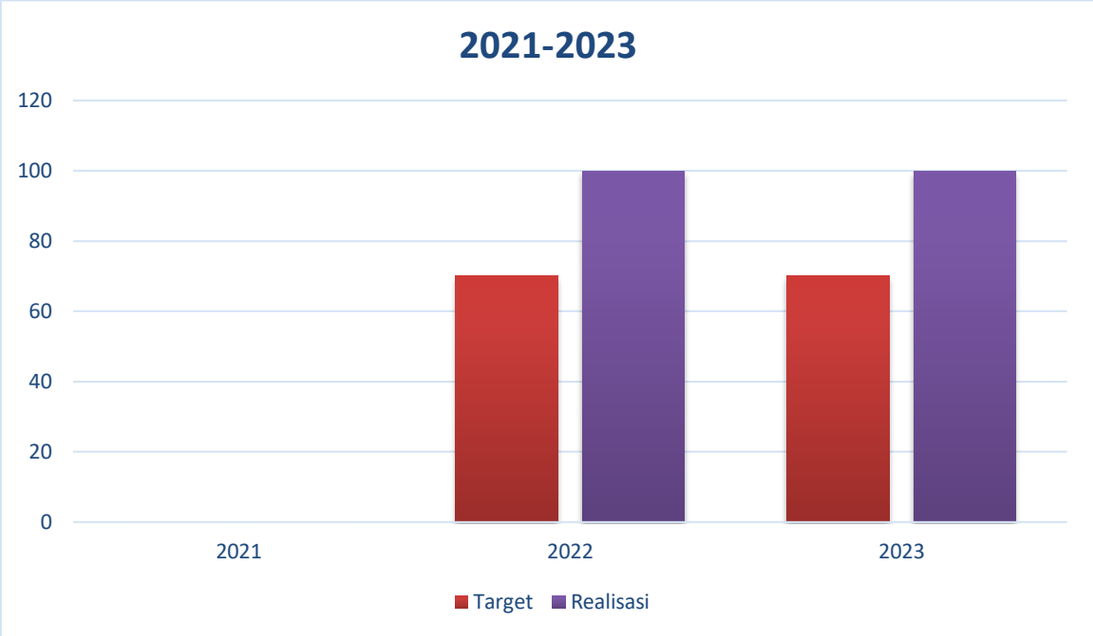

Sumber data : LKJiP Tahun 2021 dan 2022

Dikarenakan Tahun 2022 merupakan tahun pertama penerapan kinerja berdasarkan Renstra Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026, maka ada beberapa Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023 yang belum dapat dibandingkan dengan Tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya perubahan Sasaran, Indikator serta Target Kinerja dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 mengikuti perubahan Visi Misi Kepala Daerah terpilih. Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Pertama yaitu "Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum" tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru.

Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Buduran mampu mempertahankan kinerja dalam menyelesaikan permasalahan trantibum, hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Buduran mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang timbul sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat terwujud.

Namun seringkali terjadi salah persepsi bahwa dengan peningkatan capaian indikator kinerja permasalahan trantibum maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran di lapangan. Padahal dengan semakin profesional SDM Kecamatan Buduran yang menangani permasalahan trantibum dalam pelaksanaan tugasnya maka permasalahan trantibum yang timbul juga semakin meningkat. Hal ini bukan karena semakin banyaknya permasalahan trantibum yang terjadi melainkan karena semakin cermat dan kompetennya SDM Kecamatan Buduran dalam mengantisipasi permasalahan trantibum yang timbul.

Demikian halnya jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Kecamatan Gedangan Tahun 2023 sebesar 100%, maka Realisasi Kinerja Kecamatan Buduran sudah melebihi/diatas Realisasi

Kinerja Kecamatan Gedangan dengan capaian kinerja 142,86%. Namun, walaupun realisasi capaian kinerja Kecamatan Buduran sudah melebihi Kecamatan Gedangan akan tetapi nilai Target Kecamatan Gedangan jauh lebih tinggi daripada Kecamatan Buduran Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pertama Tahun 2023 Kecamatan Buduran dengan Kecamatan Gedangan

OPD	Kecamatan Buduran	Kecamatan Gedangan
Target	70%	100%
Realisasi	100%	100%
Capaian	142,86%	100%

Sumber data : LKJiP Kecamatan Gedangan Tahun 2023

Dalam mengantisipasi permasalahan Trantibum pada Tahun 2023 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan yang ada dalam pencapaian Sasaran Pertama ini, yaitu :

1. Kondisi lingkungan, sosial, masyarakat Kecamatan Buduran yang dinamis sehingga memungkinkan timbulnya permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang baru ;
2. Masih adanya laporan pengaduan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban umum, serta masih terjadi perselisihan antar masyarakat, perusahaan dengan/dan/atau desa. Contoh Laporan Pengaduan yang ditangani, yaitu terkait parkir liar di area TKD Desa Sukorejo, Pengamen yang menggangu ketentraman di desa Prasung, unjuk rasa proyek pembangunan Citra Garden PT. Fajar Abaditama, dll ;
3. Terbatasnya SDM Aparatur yang ada di Kecamatan Buduran untuk pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
4. Masih terbatasnya anggaran dan sarana serta prasarana yang tersedia untuk penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut diatas realisasi kinerja tetap tercapai secara optimal, maka Kecamatan Buduran telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Patroli rutin di seluruh kawasan wilayah Kecamatan Buduran ;
2. Pembinaan, sosialisasi dan pemberian pemahaman akan pentingnya ketertiban umum kepada masyarakat, desa dan perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Buduran ;
3. Meningkatkan sinergitas antara kecamatan, lembaga vertikal dan instansi terkait melalui forum komunikasi, koordinasi terpadu, operasi bersama dan gabungan ;
4. Melakukan pembinaan kepada desa melalui perangkat desa serta anggota satlinmas desa ; dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk Tahun 2024 kemungkinan akan timbul hambatan dan kendala serta permasalahan baru yang potensial dalam mempengaruhi tercapainya Sasaran Pertama yaitu Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum karena berlangsungnya Kegiatan Pileg dan Pilkada. Oleh karena itu, untuk mencapai target kinerja diatas Kecamatan Buduran perlu melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi hal tersebut :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan Dinas Tenis/Instansi/OPD terkait/Lembaga Vertikal lainnya ;
2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur yang ada di Kecamatan Buduran untuk pelaksanaan Kententraman dan Ketertiban Umum ;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana serta mengajukan anggaran untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2. Sasaran Kedua "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan"

Dalam pencapaian Sasaran Kedua diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 3 (tiga) Indikator. Indikator pertama yaitu : Nilai SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Indikator Kedua yaitu : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Indikator Ketiga yaitu : Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Berikut penjabaran capaian masing-masing indikator tersebut di atas :

a) Indikator Kinerja Pertama "Nilai SAKIP Kecamatan Buduran"

Tabel 3. 5
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Pertama Sasaran Kedua "Nilai SAKIP Kecamatan Buduran"

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Buduran Tahun 2023	Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	A (80,05)	BB (79,76)	99,64%	A (80,2)	99,45%

Sumber data : Reviu Renstra Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas dan Grafik dibawah ini, terlihat bahwa capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Buduran Tahun 2023 dengan nilai BB (79,76) dari target nilai A

(80,05), dengan persentase capaian sebesar 99,64%. Jika Tahun 2023 dengan nilai BB (79,76), dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra Tahun 2026 dengan target nilai A (80,2), maka terhitung hampir mencapai target, dengan persentase capaian sebesar 99,45%.

Grafik 3.2. 3
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Pertama Sasaran Kedua "Nilai SAKIP Kecamatan Buduran"

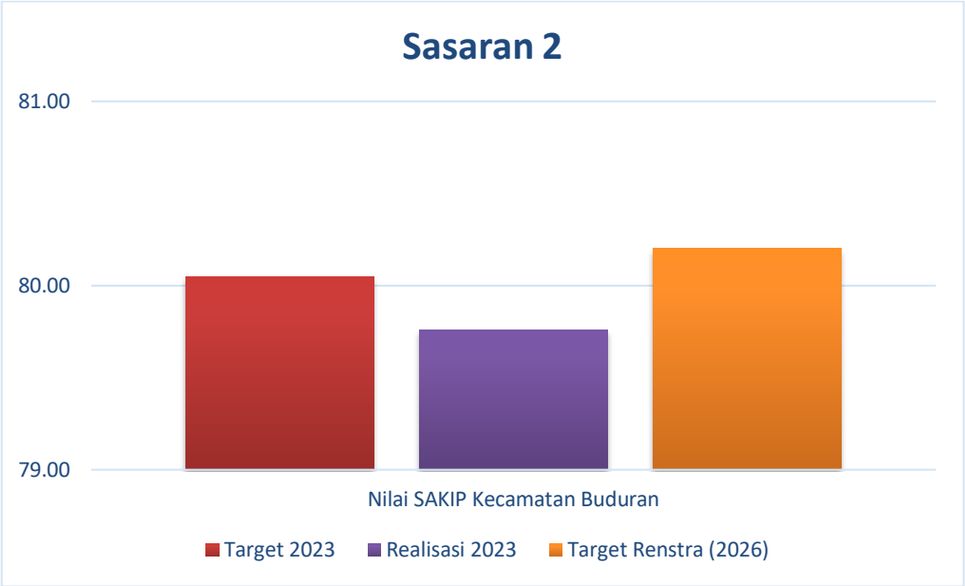

Sumber data : Reviu Renstra Tahun 2021-2026

Sedangkan bila capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Buduran dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau menunjukkan tren meningkat seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 6
Tren Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	A (80)	A (80)	A (80,05)
Realisasi	BB (78,27)	BB (79,45)	BB (79,76)
Capaian	97,84%	99,18%	99,64%

Sumber data : Data Primer Tahun 2021, 2022 dan 2023

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas, nilai SAKIP Kecamatan Buduran sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan adanya komitmen dan upaya dari SDM Aparatur kecamatan untuk meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Grafik 3.2. 4
Tren Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2021 – 2023

Sumber data : LKJiP Tahun 2021 dan 2022

Demikian halnya jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Kecamatan Gedangan Tahun 2023 sebesar 100,37%, maka Realisasi Kinerja Kecamatan Buduran masih berada dibawah Realisasi Kinerja Kecamatan Gedangan dengan capaian kinerja 99,64% sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 3. 7

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kedua Tahun 2023 Kecamatan Buduran dengan Kecamatan Gedangan

OPD	Kecamatan Buduran	Kecamatan Gedangan
Target	A (80,05)	A (80,1)
Realisasi	BB (79,76)	A (80,4)
Capaian	99,64%	100,37%

Sumber data : LKJiP Kecamatan Gedangan Tahun 2023

Adapun kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja nilai SAKIP, yaitu : minimnya informasi dari OPD terkait yang mengangani SAKIP mengenai kriteria penilaian SAKIP meskipun seluruh bekas/dokumen dan data dukung yang dipersyaratkan telah dilengkapi dan dipenuhi.

Untuk meningkatkan Nilai SAKIP Kecamatan Buduran ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Mengupayakan penyediaan data yang akurat ;
2. Mengupayakan pengisian data yang optimal ;
3. Menyelaraskan kembali sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan di Kecamatan Buduran ;
4. Berkoordinasi dengan OPD terkait mengenai kriteria penilaian.

Dengan demikian kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga realisasi kinerja bisa tercapai secara optimal.

b) Indikator Kinerja Kedua “Nilai RB”

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan perubahan baik dari Unsur Organisasi, Ketatalaksanaan maupun dari Unsur Sumber Daya Manusia. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) diselenggarakan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan di seluruh Aspek Birokrasi, sehingga birokrasi yang idel, bebas dari KKN, kapabel dan mampu memberikan layanan prima kepada masyarakat dapat terwujud.

Bahwa untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran Pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan instrumen evaluasi reformasi birokrasi yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023, maka Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sesuai dengan PERMENPAN No 9 Tahun 2023 maka penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ditiadakan, sehingga Tahun 2023 untuk Realisasi dan Capaian Nilai RB diberi nilai nol (0) dikarenakan tidak adanya penilaian Reformasi Birokrasi di Tahun 2023.

Tabel 3. 8
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kedua Sasaran Kedua “Nilai RB”

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Buduran Tahun 2023	Nilai RB	31,25	0	0	32	0

Sumber data : Renstra Tahun 2021 – 2026

Grafik 3.2. 5
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kedua Sasaran Kedua “Nilai RB”

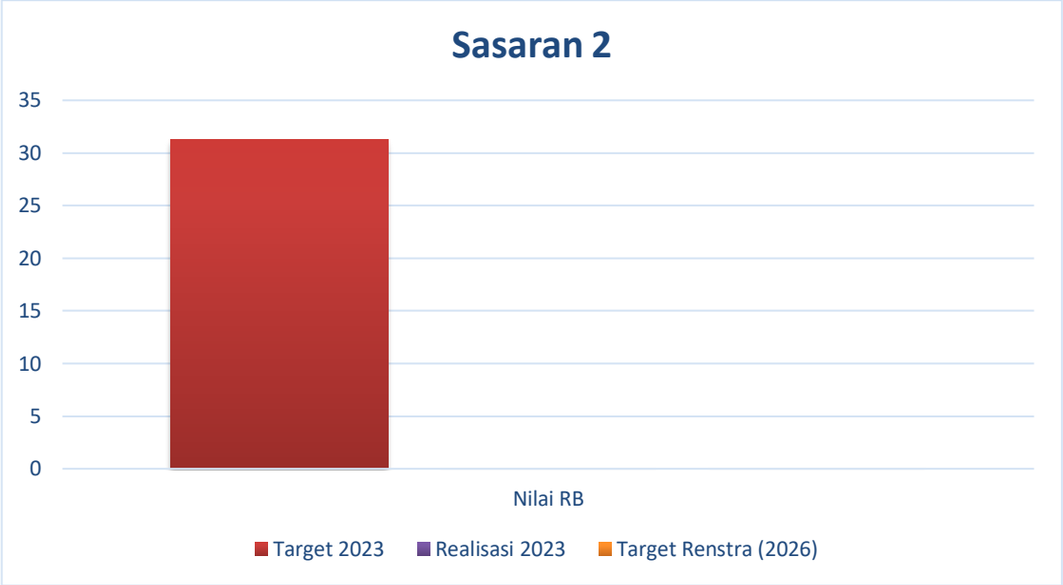

Sumber data : Reviu Renstra 2021-2026

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas, Capaian indikator kinerja (IK) Nilai RB tahun 2023 adalah nol. Hal itu dikarenakan tahun ini tidak dilakukan penilaian RB karena adanya kebijakan baru dari Kemenpan RB No. 3 Tahun 2023 dan No. 9 Tahun 2023 yang mana dalam ketetapannya tersebut tidak mengakomodir Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).Sedangkan, bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau menunjukkan tren meningkat, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 9
Tren Realisasi Nilai RB Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	30,37	31,12	31,25
Realisasi	30,37	32,79	0
Capaian	100%	105%	0

Sumber data : Data Primer Tahun 2021, 2022 dan 2023

Grafik 3.2. 6
Tren Realisasi dari Nilai RB Tahun 2021 – 2023

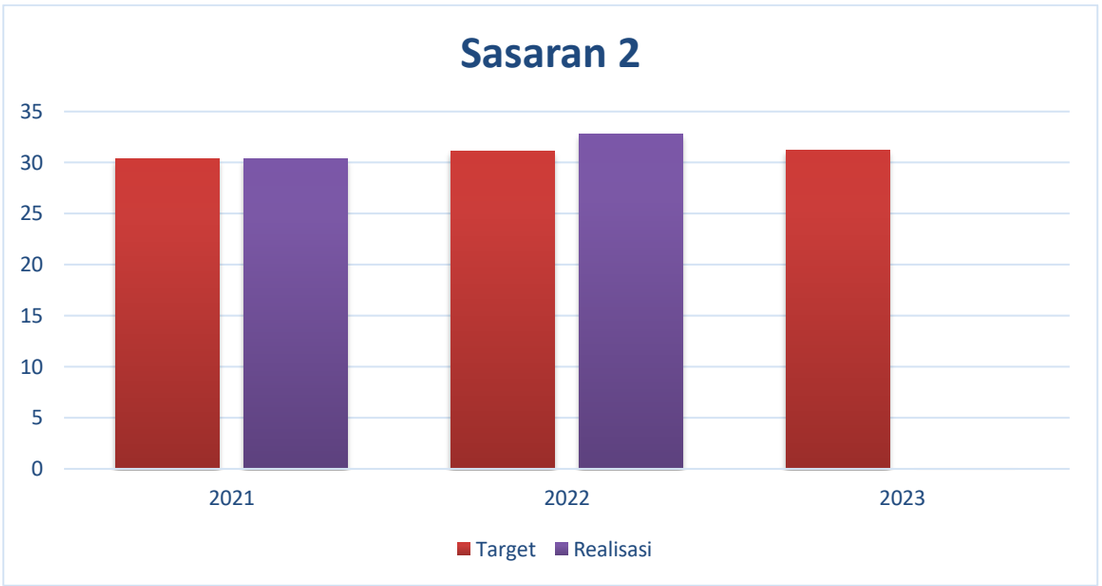

Sumber data : LKJiP Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan Tabel 3.7 diatas, Capaian indikator kinerja (IK) Nilai RB tahun 2023 adalah nol. Namun, pada tahun 2022 Capaian Nilai RB Kecamatan Buduran yaitu sebesar 32,79 dari target 31,12 dengan presentase 105% dan pada tahun 2021 sebesar 30,37 dari target 30,37 dengan presentase 100%.

Demikian halnya jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Kecamatan Gedangan Tahun 2023 sebesar 0, maka Realisasi Kinerja Kecamatan Buduran sama dengan Realisasi Kinerja Kecamatan Gedangan dengan capaian kinerja 0. sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 3. 10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kedua Tahun 2023 Kecamatan Buduran dengan Kecamatan Gedangan

OPD	Kecamatan Buduran	Kecamatan Gedangan
Target	31,25	28
Realisasi	0	0
Capaian	0	0

Sumber data : LKJiP Kecamatan Gedangan Tahun 2023

c) Indikator Kinerja Ketiga “Nilai IPP”

Indeks pelayanan publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah berdasarkan 8 (delapan) aspek penilaian yaitu : Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek

Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Aspek Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Tabel 3. 11
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Ketiga Sasaran Kedua "Nilai IPP"

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Buduran Tahun 2023	Nilai IPP	B (3,55)	B- (3,45)	97,18%	B (3,80)	90,79%

Sumber data : Data Primer Tahun 2023

Grafik 3.2. 7
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Ketiga Sasaran Kedua "Nilai IPP"

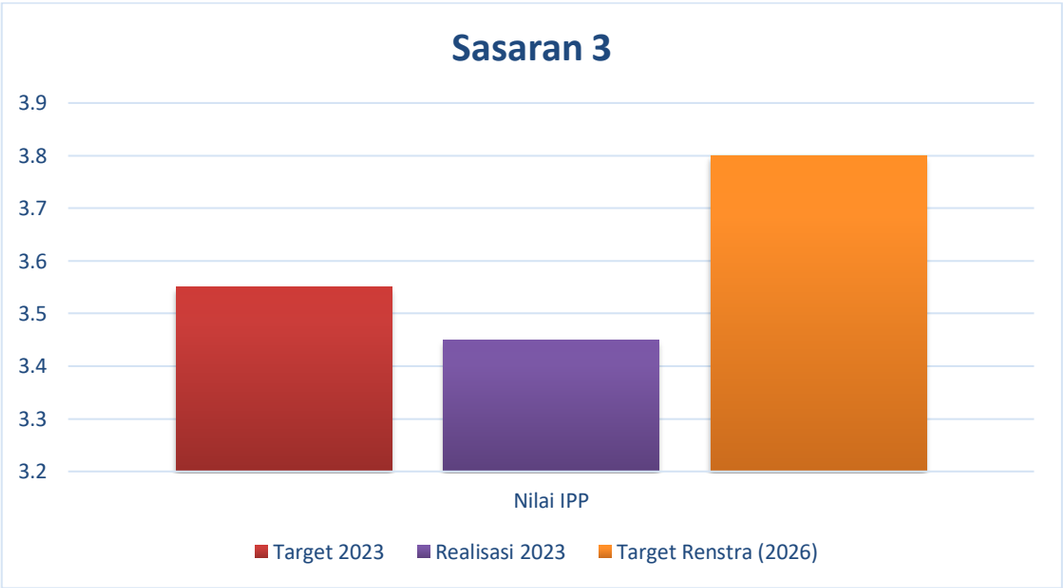

Sumber data : Reviu Renstra 2021-2026

Berdasarkan Tabel 3.8 diatas, Capaian Indikator Kinerja Nilai IPP Tahun 2023 dengan nilai B- (3,45) dari target nilai B (3,55) dengan persentase sebesar 97,18%. Jika dibandingkan dengan target nilai B (3,80) pada akhir periode Renstra Tahun 2026, maka pada Tahun 2023 target belum tercapai karena hanya mencapai nilai B- (3,45) dan persentase capaian masih sebesar 90,79%. Hal ini terjadi karena masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan seperti toilet khusus pengguna disabilitas. Meskipun begitu Nilai IPP Tahun 2023 ini apabila dibandingkan

dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 12
Tren Realisasi dari Nilai IPP Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	B- (3,11)	B (3,51)	B (3,55)
Realisasi	B- (3,19)	B- (3,39)	B- (3,45)
Capaian	102,57%	96,58%	97,18%

Sumber data : Data Primer Tahun 2021, 2022 dan 2023

Grafik 3.2. 8
Tren Realisasi dari Nilai IPP Tahun 2021 – 2023

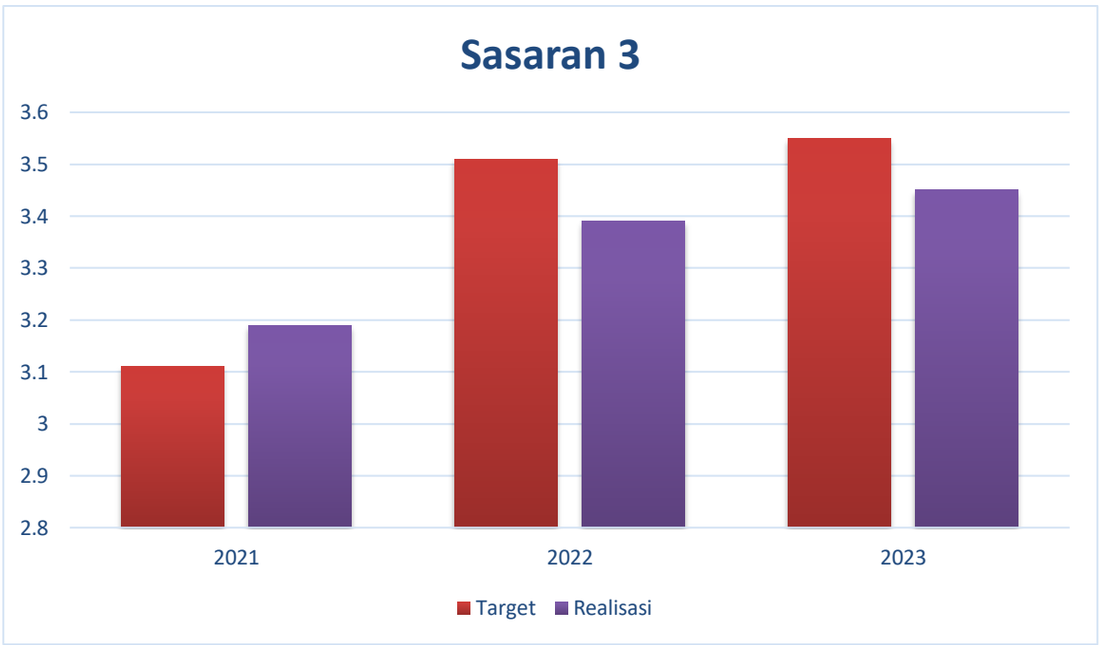

Sumber data : LKJiP Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan Tabel 3.9 dan Grafik diatas, Nilai IPP Kecamatan Buduran Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin dibandingkan dengan Tahun 2022 dan Nilai IPP Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,2 poin dibandingkan dengan Tahun 2021. Kenaikan ini terjadi karena komitmen Kecamatan Buduran untuk konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecamatan Buduran selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dan berusaha memenuhi target yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan kecamatan untuk mencapai kriteria tersebut adalah :

1. Memberikan pelayanan prima (excellent service) ;
2. Memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan Masyarakat ;

3. Mengupayakan pengisian data penilaian yang optimal dan akurat.

Demikian halnya jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Kecamatan Gedangan Tahun 2023 sebesar 91,65%, maka Realisasi Kinerja Kecamatan Buduran sudah berada diatas Realisasi Kinerja Kecamatan Gedangan dengan capaian kinerja 97,18% sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 3. 13

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kedua Tahun 2023 Kecamatan Buduran dengan Kecamatan Gedangan

OPD	Kecamatan Buduran	Kecamatan Gedangan
Target	B (3,55)	A (4,55)
Realisasi	B- (3,45)	A (4.17)
Capaian	97,18%	91,65%

Sumber data : LKJiP Kecamatan Gedangan Tahun 2023

Namun walaupun realisasi capaian kinerja Kecamatan Buduran sudah melebihi Kecamatan Gedangan akan tetapi nilai Target dan Realisasi Kecamatan Gedangan jauh lebih tinggi daripada Kecamatan Buduran, yaitu : Target sebesar 4,55 dan Realisasi sebesar 4,17.

B Realisasi Kinerja Anggaran

1) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran x Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian Kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja

Tabel 3. 14
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
				a	b	c		$\frac{(a*b)-c}{(a*b)}x100\%$
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	70%	100%	142.86%	46,855,500	44,158,500	94.24%	34.03%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah an Kecamatan	1.Nilai SAKIP	80.05	79.76	98.40%	5,571,868,045	4,995,252,850	89.65%	8.89%
	2. Niai RB	31.25	0					
	3. Nilai IPP	3.55	3.45					

Sumber data : Renstra 2021 – 2026 dan DPA Tahun Anggaran 2023

Terkait pagu anggaran pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah an Kecamatan yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap-tiap indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan menggunakan rumus :

$$CKP = \prod_{i=1}^{m}\left(\left(\left(\prod_{m}^{n}\frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i}\right)^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}}\right) \times 100\%$$

Keterangan:
CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program
m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program
n : Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Program

Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indikator, kemudian diakarpangkatkan dengan banyaknya jumlah indikator tersebut

Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Kecamatan Buduran adalah :

- Sasaran/indikator Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan tingkat efisiensi sebesar 34.03% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
  - Adanya koordinasi yang baik dengan pihak internal dan ekternal terkait penyelesaian laporan pengaduan yang masuk ke Kecamatan Buduran
- Sasaran/indikator Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan tingkat efisiensi sebesar 8.89% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
  - Realisasi Kegiatan yang bersifat rutin menyesuaikan dengan kebutuhan dan terdapat efisiensi harga karena belanja melalui e purchasing;

- Efisiensi biaya terkait penggunaan anggaran hanya direalisasikan sesuai dengan kebutuhan (anggaran tidak diserap semua);

2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Tabel 3. 15
Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	142,86%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.46.855.500	Rp.44.158.500	94,24 %
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	a. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran b. Nilai RB Kecamatan Buduran c. Nilai IPP Kecamatan Buduran	a. 99,64% b. 105% c. 97,18%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.5.439.023.948	Rp.4.877.503.050	89,68 %
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.106.234.057	Rp.92.277.800	86,86 %
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.21.297.540	Rp.20.212.000	94,90 %
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.5.312.500	Rp.5.260.000	99,01 %

Sumber data : Reviu Renstra Tahun 2021 - 2026

Pada Tabel 3.11 diatas dapat dilihat bahwa hampir seluruh program Kecamatan Buduran ikut menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Buduran. Ada 3 (tiga) Program yang masuk kategori berhasil karena capaian anggaran di atas 90%, yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Sedangkan 2 (dua) Program lainnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik termasuk kategori cukup karena capaian masih kurang dari 90%. Adapun Program yang capaian kinerjanya termasuk kategori cukup terjadi akibat terkendala waktu PAK (Anggaran mengalami pergeseran pada PAK).

3) Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2023 berdasarkan realisasi keuangan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 16
Realisasi Anggaran

Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.46.855.500	Rp.44.158.500	94,24%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.5.439.023.948	Rp.4.877.503.050	89,68%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.106.234.057	Rp.92.277.800	86,86%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.21.297.540	Rp.20.212.000	94,90%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.5.312.500	Rp.5.260.000	99,01%

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan SIKSDA

BAB IV
PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja **Kecamatan Buduran** Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2023 yaitu Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Sasaran dan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Sasaran dapat dikategorikan sangat berhasil. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat lebih optimal.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran yang ada di **Kecamatan Buduran** Kabupaten Sidoarjo antara lain :

1. Kondisi lingkungan, sosial, masyarakat Kecamatan Buduran yang dinamis sehingga memungkinkan terjadi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang baru ;
2. Masih adanya laporan pengaduan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban umum, Serta masih terjadi perselisihan antar masyarakat, perusahaan atau desa. Contoh Laporan pengaduan yang di tangani, yaitu terkait parkir liar di area TKD Desa Sukorejo, Pengamen yang menggangu ketentraman di desa Prasung, Unjuk rasa proyek pembangunan Citra Garden PT. Fajar Abaditama, dll ;
3. Terbatasnya SDM Aparatur yang tersedia untuk pelaksanaan Kententraman dan Ketertiban Umum ;
4. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum ;
5. Tidak adanya informasi dari OPD terkait mengenai kriteria penilaian meskipun seluruh dokumen data dukung telah di penuhi ;
6. Masih kurang memadainya sarana prasarana yang ada di kecamatan seperti toilet khusus pengguna disabilitas dan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

B Pemecahan Masalah/Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, **Kecamatan Buduran** Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain :

1. Patroli rutin di seluruh kawasan wilayah Kecamatan Buduran ;
2. Pembinaan dan pemberian pemahaman akan pentingnya ketertiban umum kepada masyarakat, desa dan perusahaan sekitar ;
3. Meningkatkan sinergitas antara kecamatan, lembaga vertikal dan instansi terkait melalui koordinasi terpadu, operasi bersama dan gabungan ;

4. Melakukan Pembinaan kepada desa melalui perangkat desa serta anggota satlinmas desa ;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum ;
6. Mengupayakan penyediaan data yang akurat ;
7. Mengupayakan pengisian data yang optimal ;
8. Menyelaraskan kembali sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan di Kecamatan Buduran ;
9. Berkoordinasi dengan OPD terkait mengenai kriteria penilaian ;
10. Memberikan pelayanan prima (excellent service) ;
11. Memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan Masyarakat.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

https://drive.google.com/file/d/141tHuD2_jk64pSu3x_nDM23_Z3OnBpX1/view?usp=drive_link

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Dok. SK. Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

https://drive.google.com/file/d/1dF_sUSQ3vcsvTjeRSIyvxVpiocIwc_dk/view?usp=drive_link

C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023

Dok. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023

https://drive.google.com/file/d/1COC9ExNaOcln5MBHEuyfY3L53aYpJ6Nm/view?usp=drive_link

D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2023

Pohon Kinerja Kecamatan Buduran Tahun 2023

https://drive.google.com/file/d/1WIgccDhCIcqxqHw3LrmTuQjhCPQbOTqj/view?usp=drive_link

E. Matriks Renstra

Matriks Renstra Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026

https://drive.google.com/file/d/1ssbE8Ru8O7Bv3xtKzE8H4os_C855ezdR/view?usp=drive_link

F. LHE SAKIP Tahun n-1

LHE SAKIP Tahun 2022

https://drive.google.com/file/d/1SEyi6J8pCbRsgMPthhKewKj3JX7qvx-z/view?usp=drive_link

G. Tanggapan/ Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun n-1

Tanggapan/ Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2022

https://drive.google.com/file/d/1FscMv98cp7nnBcYIT15eKqIJNNCZUlYY/view?usp=drive_link

H. Inovasi Tahun n

Inovasi Tahun 2023

https://drive.google.com/file/d/1tky2btIPkJ8XKRWFZn1sl68mfWdlDmBg/view?usp=drive_link

I. Bukti Dukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja

Bukti Dukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1WiyBHVPW923ryIngrkFWhbijyNV5hnFd?usp=drive_link